

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Jepara

Kabupaten Jepara merupakan wilayah kaya akan narasi historis dan kepahlawanan dalam historiografi nasional dengan ditandai peran sentral perempuan dalam lintasan kepemimpinan, mulai dari Ratu Shima pada abad ke-7 (Kerajaan Kalingga) yang dikenal dengan kepemimpinannya yang tegas dan berkeadilan, hingga Ratu Kalinyamat pada abad ke-16 yang dikenal atas kekuatan dan keahlian maritimnya terhadap kolonialisme, serta kelahiran pelopor emansipasi perempuan dan pendidikan pribumi, R.A. Kartini (Sartono, 2012; Susanti, 2018). Kekayaan narasi historis ini kemudian dikontekstualisasikan dalam ruang publik melalui peresmian Monumen Trijuang Jepara (Tugu Tiga Wanita) oleh Pemerintah Kabupaten Jepara pada 22 Desember 2016 (Medcom.id, 2016).

Gambar 2.1 Monumen Trijuang Jepara (Tugu Tiga Wanita)



Sumber: Medcom.id (2016)

Monumen setinggi ±15 meter yang berlokasi di Bundaran Ngabul ini secara simbolis mengabadikan ketiga tokoh perempuan tersebut sebagai representasi kolektif dari kepahlawanan dan kepemimpinan perempuan Jepara (Tegas.co, 2016). Keistimewaan tata letak monumen ini terletak pada orientasi patung, di mana masing-masing patung menghadap ke arah situs historis yang terkait: Ratu Shima ke Kecamatan Keling, Ratu Kalinyamat ke Desa Mantingan, dan Kartini ke Kecamatan Mayong (Medcom.id, 2016).

Keberadaan Monumen Trijuang, lebih dari sekadar elemen estetika kota atau ikon pariwisata semata, melainkan juga merupakan penanda identitas yang menegaskan simbol emansipasi dan pengakuan atas peran perempuan dalam pembangunan daerah dan memori kolektif masyarakat Jepara (Geertz, 1973) dan sebagai peneguh simbol emansipasi dan representasi perempuan dalam struktur masyarakat dan ruang publik (Foucault, 1986). Dalam praktek sehari-hari, Monumen Trijuang telah menjadi sebuah *landmark* identitas perempuan Jepara yang kuat, seringkali dijadikan latar belakang visual, terutama saat senja, yang semakin memperkuat posisinya sebagai elemen vital dalam narasi kolektif warga. Dengan demikian, Monumen Trijuang tidak hanya berfungsi sebagai pengingat sejarah, melainkan juga sebagai marker identitas yang dinamis dan penanda kontribusi perempuan yang terus berlanjut.

Kabupaten Jepara merupakan salah satu daerah yang terletak di pesisir utara Provinsi Jawa Tengah dengan posisi geografis yang strategis. Secara spasial wilayah ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati di sebelah timur, serta Kabupaten Demak di bagian

selatan dan barat (Susanto, 2020). Kondisi geografis ini menempatkan Jepara pada persimpangan antara kawasan laut dan daratan yang secara inheren membentuk dualisme karakteristik maritim sekaligus agraris, karena di satu sisi berhadapan langsung dengan kawasan laut, sementara di sisi lain memiliki hamparan daratan yang cukup luas dan produktif. Implikasi dari kondisi geografis tersebut adalah diversifikasi sumber daya alam dan kegiatan ekonomi masyarakatnya.

Secara kuantitatif, luas wilayah Kabupaten Jepara mencapai $\pm 1.004,16$ km² dengan bentang topografi yang bervariasi mulai dari dataran rendah hingga kawasan perbukitan, mencakup daratan utama dan kepulauan (Karimunjawa). Bentang alam atau topografi wilayah ini bervariasi meliputi dataran rendah di pesisir hingga kawasan perbukitan di bagian tengah dan timur. Variasi topografi ini sangat memengaruhi pola spasial dan fungsional wilayah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jepara (2024), ketinggian desa per kecamatan memperlihatkan variasi yang signifikan sehingga memengaruhi karakteristik permukiman, pola penggunaan lahan, serta kegiatan ekonomi masyarakat di masing-masing wilayah (BPS Jepara, 2024). Hal ini menegaskan bahwa pembangunan dan kebijakan spasial di Jepara harus mempertimbangkan aspek heterogenitas topografis dan ekologis.

Secara administratif, Kabupaten Jepara terbagi ke dalam 16 kecamatan dengan jumlah 184 desa dan 11 kelurahan (BPS Jepara, 2024). Komposisi ini menunjukkan dominasi wilayah pedesaan dibandingkan perkotaan yang memiliki implikasi penting terhadap arah pembangunan daerah. Dengan tingginya jumlah desa, strategi pembangunan di Jepara lebih banyak menitikberatkan pada

pendekatan berbasis komunitas dan penguatan kapasitas kelembagaan lokal. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat desa, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan potensi lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Prasetyo, 2021).

Tabel 2.1 Jumlah Desa / Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Jepara
2024

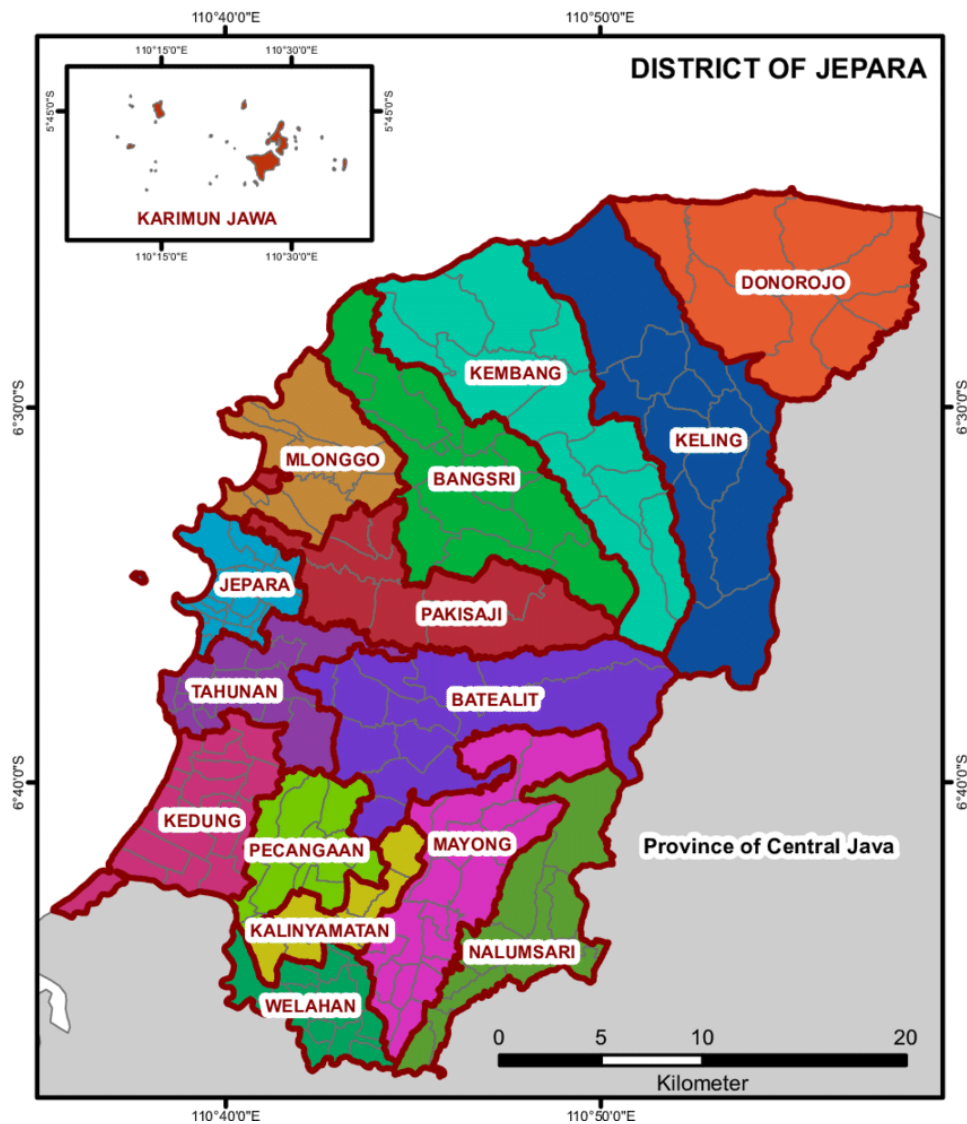
No.	Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan
1.	Kedung	18
2.	Pecangaan	12
3.	Kalinyamatan	12
4.	Welahan	15
5.	Mayong	18
6.	Nalumsari	15
7.	Batealit	11
8.	Tahunan	15
9.	Jepara	16
10.	Mlonggo	8
11.	Pakis Aji	8
12.	Bangsri	12
13.	Kembang	11
14.	Keling	12
15.	Donorojo	8
16.	Karimunjawa	4
Jumlah		195

Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2024

Selain itu, keberadaan Jepara sebagai daerah pesisir dengan akses langsung ke Laut Jawa juga menjadikannya sebagai salah satu pusat kegiatan perdagangan dan kelautan di Jawa Tengah. Kondisi ini memperkaya struktur sosial-ekonomi masyarakat Jepara yang tidak hanya bertumpu pada sektor pertanian dan industri mebel ukir, tetapi juga sektor perikanan dan pariwisata bahari, seperti Karimunjawa yang telah dikenal secara nasional maupun

internasional. Peta wilayah Kabupaten Jepara dapat dilihat pada Gambar 2.2 yang memperlihatkan konfigurasi wilayah daratan dan kepulauan, sekaligus menunjukkan posisi Jepara sebagai daerah dengan potensi maritim yang besar.

Gambar 2.2 Peta Wilayah Kabupaten Jepara



Sumber: Data diolah dari Irawati R.H, & Purnomo H. (2012)

Pada tahun 2023, jumlah total penduduk tercatat sebanyak 1.214.158 jiwa di mana terjadi dominasi populasi perempuan dengan jumlah 611.844 jiwa, melampaui populasi laki-laki yang berjumlah 602.314 jiwa (BPS Kabupaten

Jepara, 2024). Dominasi perempuan dalam struktur penduduk di satu sisi menyajikan potensi pembangunan yang substantif, namun di sisi lain turut menyoroiti persoalan ketimpangan gender yang masih laten. Indikator ini tercermin dari capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang meskipun menunjukkan tren perbaikan, secara persisten mengindikasikan adanya kesenjangan akses perempuan terhadap sumber daya pembangunan, termasuk pendidikan, kesempatan kerja, dan partisipasi politik, jika dibandingkan dengan laki-laki (BPS Kabupaten Jepara, 2023). Struktur umur penduduk Jepara didominasi oleh kelompok usia produktif (15–64 tahun) dengan persentase mencapai lebih dari 65% dari total populasi. Dominasi kelompok usia produktif ini merupakan modal demografi besar yang dapat mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara keseluruhan (Suryanegara & Abdullah, 2022). Kendati demikian, kondisi ini secara simultan menuntut perumusan dan implementasi kebijakan pembangunan yang inklusif dan responsif gender (Musa & Hidayati, 2020). Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa kelompok perempuan yang secara kuantitas lebih besar, tidak menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan tinggi, lapangan pekerjaan formal, atau layanan publik yang berkualitas, sehingga potensi mereka dapat dioptimalkan.

Pada aspek pendidikan, angka partisipasi sekolah di Kabupaten Jepara menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi, masih terdapat kesenjangan akses pendidikan antara laki-laki dan perempuan, terutama pada jenjang pendidikan menengah, yang dapat memengaruhi kualitas sumber daya

manusia di masa mendatang (BPS Kabupaten Jepara, 2023). Dari sisi kesehatan, angka harapan hidup masyarakat Jepara relatif tinggi dan menunjukkan tren positif. Meski demikian, tantangan masih terdapat pada upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang menjadi indikator dalam pembangunan kesehatan daerah (BPS Kabupaten Jepara, 2023).

Landasan perekonomian Kabupaten Jepara ditopang oleh beberapa sektor primer, meliputi industri pengolahan terutama mebel ukir yang memiliki orientasi ekspor global, perdagangan, dan pariwisata bahari yang difokuskan pada kawasan strategis seperti Karimunjawa. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jepara selama lima tahun terakhir secara umum menunjukkan tren pertumbuhan positif, meskipun sempat mengalami kontraksi signifikan akibat dampak pandemi COVID-19 (BPS Kabupaten Jepara, 2023). Peran sektor industri pengolahan sangat dominan dalam struktur perekonomian daerah yang kemudian diikuti oleh sektor perdagangan dan jasa.

Terkait dengan ketenagakerjaan, struktur lapangan kerja di Jepara didominasi oleh sektor informal dengan tingkat keterlibatan perempuan yang substansial, terutama dalam industri rumah tangga, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta kerajinan mebel. Meskipun demikian, kesenjangan gender masih terdeteksi di pasar tenaga kerja, bermanifestasi dalam bentuk perbedaan tingkat upah, segregasi posisi kerja, dan keterbatasan akses perempuan terhadap modal ekonomi serta peluang kewirausahaan yang lebih besar (BPS Kabupaten Jepara, 2023). Selain itu, tingkat kemiskinan Kabupaten Jepara pada tahun 2023 tercatat sebesar 9,54%, sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata

Provinsi Jawa Tengah (BPS Kabupaten Jepara, 2023). Data ini secara kolektif mengindikasikan kebutuhan mendesak akan strategi pembangunan daerah yang lebih berkeadilan gender dengan tujuan memastikan bahwa perempuan sebagai kelompok yang secara kuantitas dominan, memperoleh kesempatan yang setara dan adil dalam meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi ekonomi.

Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara pada tahun 2024 tercatat sebanyak 50 orang, terdiri atas 41 laki-laki dan hanya 9 perempuan (BPS Kabupaten Jepara, 2024). Jika dibandingkan dengan ketentuan kebijakan afirmatif mengenai keterwakilan perempuan minimal 30 persen, komposisi ini memperlihatkan bahwa perempuan masih kurang terwakili dalam ranah politik formal di tingkat daerah. Di sisi lain, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Jepara pada tahun 2024 mencapai 9.873 orang dengan distribusi 4.317 orang atau sekitar 43,73 persen laki-laki, dan 5.556 orang atau sekitar 56,27 persen perempuan (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya dominasi pegawai perempuan di birokrasi daerah, meskipun dalam posisi strategis seperti legislatif, keterwakilan perempuan masih terbatas. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022, struktur perangkat daerah di Kabupaten Jepara terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat Daerah

4. Dinas Daerah, meliputi:

- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
- Dinas Kesehatan
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Perhubungan
- Dinas Komunikasi dan Informatika
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)
- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
- Dinas Perikanan
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

5. Badan Daerah, meliputi:

- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda)

- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

6. Kecamatan , sebanyak 16 kecamatan (Sumber: Pemkab Jepara, 2022).

2.2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara

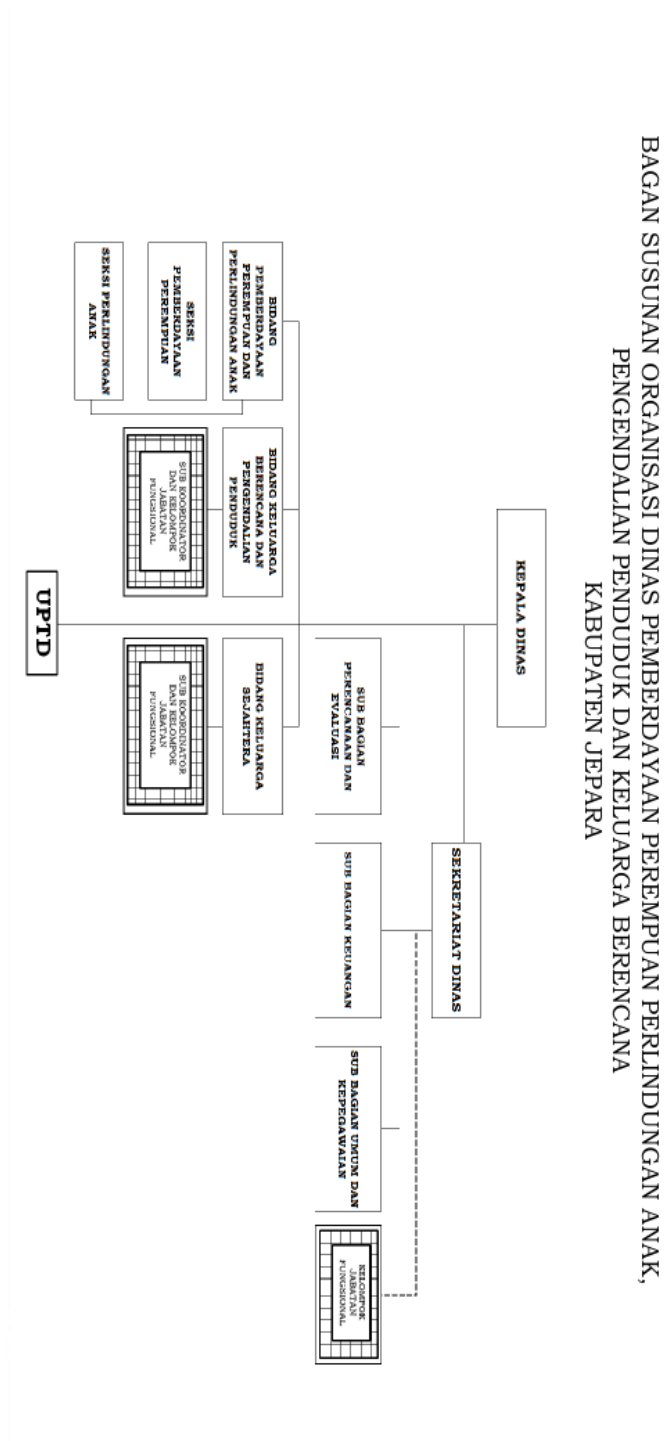
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi DP3AP2KB. Dinas ini memiliki mandat utama dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, serta keluarga berencana. Visi DP3AP2KB adalah “Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak yang Berkualitas serta Pengendalian Penduduk yang Efektif dalam Mendukung Pembangunan Daerah”. Visi tersebut dijabarkan dalam misi, di antaranya:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan hak perempuan.
2. Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
3. Meningkatkan pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan daerah.
4. Meningkatkan kualitas keluarga melalui pengendalian penduduk, keluarga berencana, serta pembangunan keluarga.

Secara struktural, DP3AP2KB Kabupaten Jepara terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris
 - Kasubag Perencanaan dan Evaluasi.
 - Kasubag Keuangan.
 - Kasubag Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Kasi Pemberdayaan Perempuan.
 - Kasi Perlindungan Anak.
4. Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Anak
 - Sub Koordinator Pelayanan Keluarga Berencana.
 - Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan KIE.
5. Bidang Keluarga Sejahtera
 - Sub Koordinator Pemberdayaan Keluarga.
 - Sub Koordinator Ketahanan Institusi Masyarakat.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.3 Struktur Organisasi DP3AP2KB Kabupaten Jepara



Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021

Dalam melaksanakan tugasnya, DP3AP2KB berfungsi menyusun dan melaksanakan kebijakan, memberikan pelayanan publik, serta melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Selain itu, DP3AP2KB juga berperan sebagai motor penggerak dalam pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Jepara melalui penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), pembentukan Pokja PUG, serta fasilitasi penyusunan regulasi dan kebijakan daerah yang responsif gender (Perbup Jepara Nomor 65 Tahun 2021; DP3AP2KB Jepara, 2024).

Berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2024, DP3AP2KB menetapkan Sasaran II, yaitu meningkatkan pengarusutamaan gender dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan. Indikator kinerjanya meliputi persentase perangkat daerah yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) serta persentase kelembagaan PUG aktif. Namun, realisasi menunjukkan capaian masih belum optimal, di mana persentase kelembagaan PUG aktif hanya sebesar 86% dari target 100% (RKT DP3AP2KB, 2024).

Sementara itu, Renstra DP3AP2KB Tahun 2023–2026 mencatat bahwa jumlah pegawai dinas ini sebanyak 47 orang, dengan komposisi pendidikan meliputi 6 orang berpendidikan S2, 30 orang S1, 2 orang D3, dan 9 orang lulusan SMA/SMK. Komposisi ini menunjukkan dominasi pegawai berpendidikan tinggi, yang diharapkan dapat menunjang pelaksanaan program-program strategis.

Dengan kondisi kelembagaan tersebut, DP3AP2KB diharapkan mampu berperan optimal sebagai motor penggerak kesetaraan gender, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk di Kabupaten Jepara.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai

Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin, dan Golongan

No	Tingkat Pendidikan	PNS			PLKB			NON PNS			JUMLAH
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	
1.	SLTP/Sederajat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	SLTA/Sederajat	2	2	4	2	2	4	2	8	10	35
3.	D3	1	2	3	3	4	7	0	0	0	9
4.	S1	1	4	5	11	11	22	1	0	1	35
5.	S2	4	5	9	3	1	4	0	0	0	17
6.	S3			0			0				0
JUMLAH		8	13	21	19	17	38	3	8	11	96

Sumber: Rencana Strategis DP3AP2Kb Kabupaten Jepara (2023-2026)

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2021

No	Golongan	L	P	Jumlah
1.	Golongan I	-	-	
2.	Golongan II	-	2	2
3.	Golongan III	9	13	22
4.	Golongan IV	9	5	14
Total		18	20	38

Sumber: Rencana Strategis DP3AP2Kb Kabupaten Jepara (2023-2026)